

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group Kencana.
- Bahsan, M. (2002). *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.
- Hartono, Siti Soemarti. (1981). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM.
- Kansil, C.S.T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono. (1974). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. (1996). *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Nadirah. (2014). *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Nating. (2004). *Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*. Surabaya: RajaGrafindo Persada.
- S., Salim H. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. (2011). *Hukum acara perdata (teori dan praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. (1977). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin.

- Setiawan, Rachmat. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni.
- Shubhan, M. Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sinaga, Muhammad Syamsudin. (2012). *Hukum di Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Situmorang, Victor dan Soekarso. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masyohen. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Sriwaty, Sakkirang. (2011). *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Teras.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suci, I. dan Herowati Poesoko. (2011). *Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBank PRESSindo.
- Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sofmedia.
- Supramono, Gatot. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta : Kencana.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (1995). *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Suyatno, Anton. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Cetak Pertama Kencana.
- Syahrani, Riduan. (2009). *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

C. JURNAL

Basir, Abd dan St Fatimah. (2023). *Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah*. *Pledoi Law Jurnal* Vol. 1, no. 1. <https://doi.org/10.89453/fkmip.v7i5.674>.

Inayati, Raisa. (2019). *Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pembersihan Harta Pailit*. *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* Vol. 5, no. 1. <https://doi.org/10.29138/spirit.v5i1.908>.

Mantili, Rai. (2021). *Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.6, no. 2. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>.

Pradhnyana, Alya, Toto dan Rimba. (2022). *Implikasi Hukum Atas Putusan Derden Verzet Dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai Bantahan Terhadap Sita Eksekusi Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata*. *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2, no. 1. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.840>.

Pradnyawati, P. dan I. Nengah Laba. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek*. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.2.1.2018.25-33>.

Prajogo, Timotius William. (2018). *Penyalahgunaan Instrumen Kepailitan atau PKPU oleh Debitor Setelah Memperoleh Fasilitas Kredit dari Lembaga Keuangan*. *Jurnal Media dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya*, Vol. 4, no. 2. <http://dx.doi.org/10.29062/jmhp.v4i2.12>.

Sitorus, Syahrul. (2018). *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)*. Jurnal Hikmah Vol. 15, no. 1. <https://doi.org/10.73598/siyhf.v6i2.760>.

Buana, Bendesa Made Cintia. (2014). *Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata*. JURNAL RECHTENS Vol. 3, no. 2. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v3i2.96>.

D. WAWANCARA

Sudar, Hakim Pengadilan Niaga Surabaya, 5 November 2024.

Pujianto, Pengacara LBH FSPMI Jatim, 18 September 2024.